

WANITA JEPANG DALAM PETA POLITIK JEPANG

TAHUN 1985 – 2003

Skripsi sarjana ini diajukan untuk memenuhi

tugas akhir untuk mencapai gelar

Sarjana Sastra

Oleh

Andi Anita Rizki Abadi

NIM: 99111007

Jurusan Sastra Jepang S1



UNIVERSITAS DARMA PERSADA

JAKARTA

TAHUN 2004

Halaman persetujuan pembimbing

Skripsi yang berjudul

WANITA JEPANG DALAM PETA POLITIK JEPANG

TAHUN 1985 - 2003

Oleh

Andi Anita Rizki Abadi

NIM : 99111007

Disetujui untuk diujikan dalam sidang ujian skripsi
sarjana oleh:

Mengetahui

Ketua Jurusan Bahasa dan

Dekan Fakultas Sastra

Sastra Jepang



(Dra. Yuliasih Ibrahim)



UNIVERSITAS
DARMA PERSADA
FAKULTAS SASTRA

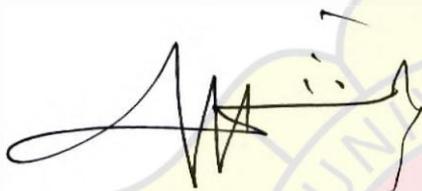
(Dra. Hj. Inny C. Haryono, MA)

Skripsi ini telah diujikan pada hari senin, tanggal 23 Agustus 2004.

Panitia ujian:

Pembimbing/ Penguji I

Ketua Panitia



(Syamsul Bahri, SS)



(Dra. Tini Priantini)

Pembimbing/ Penguji II

Ketua Jurusan Bahasa dan Sastra Jepang



(Nani Dewi Sunengsih, SS)



(Dra. Yuliasih Ibrahim)

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kebesaran karunia-Nya, sehingga penulis dengan segala keterbatasan yang ada dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Wanita Jepang Dalam Peta Politik Jepang Tahun 1985 - 2003".

Selesainya skripsi ini tak lepas dari bimbingan dan bantuan berbagai pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih. Semoga Tuhan membalas amal kebajikannya. Amin.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Saran dan kritik dari semua pihak sangat diharapkan untuk penyempurnaan.

Universitas Darma Persada

Penulis

Jakarta

Mei 2004

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	v
Daftar Grafik	v

BAB I PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang	1
I.2 Permasalahan	13
I.3 Tujuan Penulisan	13
I.4 Ruang Lingkup	14
I.5 Metode Penelitian	14
I.6 Sistematika Penulisan	14

BAB II SISTEM PERUNDANG-UNDANGAN JEPANG

2.1 Tata Pemerintahan	16
2.1.1 Hubungan Antara Parlemen Nasional Dengan Kabinet	19
2.1.2 Hubungan Antara Parlemen Nasional Dengan Mahkamah Agung	19

2.1.3 Hubungan Antara Parlemen	
Nasional Dengan Kaisar	19
2.1.4 Hubungan Antara Majelis Rendah	
Dengan Majelis Tinggi	20
2.1.5 Pemilihan Anggota Parlemen Nasional	20
2.1.6 Pemilihan Anggota Majelis Rendah	21
2.1.7 Pemilihan Anggota Majelis Tinggi	22
2.1.8 Sidang Kerja Parlemen Nasional	22
2.2 Pemerintahan Daerah	23
2.3 Undang-Undang Yang Mendukung	
Persamaan Hak Wanita	24

BAB III GERAKAN PERSAMAAN HAK WANITA DI JEPANG

3.1 Beberapa Gerakan Persamaan	
Hak Gender	42
3.1.1 Keterlibatan Pria Dalam Gerakan	
Persamaan Hak Gender	42
3.1.2 Pandangan Terhadap Feminisme	
Persamaan Hak Gender	43
3.1.3 Pandangan Tentang Pembagian	
Tugas Rumah Tangga	44

3.1.4 Kuatnya Kekuasaan Pria Sebagai		
Kepala Keluarga Di Pedesaan	45	
3.1.5 Upaya Yang Dilakukan Pemerintah	47	
3.1.6 Upaya Yang Dilakukan		
Pemerintah Daerah	48	
3.1.7 Upaya Yang Dilakukan		
Lembaga Swadaya Masyarakat	49	
3.2 Wanita Dalam Peta Politik Jepang	51	
3.2.1 Kecilnya Jumlah Wanita Dalam		
Peta Politik Jepang	51	
3.2.2 Perjuangan Para Gubernur		
Wanita Jepang	54	

BAB IV ANALISIS

BAB V KESIMPULAN

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Rasio Jumlah Anggota Wanita Dalam Majelis Rendah Di Negara-negara Dunia

Tabel 3.2 Rasio Perbandingan Jumlah Anggota Pria Dengan Wanita Dalam Mewakili Partai Politik Pada Pemilihan Umum Majelis Rendah Juni 2002

DAFTAR GRAFIK

Grafik 3.1 Jumlah dan Rasio Anggota Wanita Di Majelis Rendah, 1987 - 2003

Grafik 3.2 Jumlah Anggota Anggota Wanita Pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, 1988 - 1999

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. LATAR BELAKANG

Isu gender; peranan wanita, telah menghadiahkan kepada dunia sebuah revolusi pada abad ke duapuluh. Lebih kurang seratus tahun yang lalu tidak ada satupun negara di dunia baik negara besar maupun negara kecil yang menjamin hak berpartisipasi dalam bidang politik bagi wanita. Tapi hari ini keadaan begitu kontras. perubahan telah terjadi. Sekarang hanya sedikit negara yang masih sangat membatasi wanita dalam berpartisipasi di bidang-bidang sosial dan politik. Negara-negara di barat telah dan terus menciptakan idealisme tentang partisipasi wanita, untuk kemudian ditularkan ke negara-negara di belahan dunia lain, dan idealisme itu antara lain adalah menjadikan hak-hak partisipasi wanita dalam kehidupan sosial dan politik dijamin oleh ketetapan-ketetapan hukum. hukum atau undang-undang yang menjamin partisipasi seluas-luasnya tanpa membedakan gender.

Sepanjang sejarah perjuangannya, isu mengenai peranan wanita selalu mengundang perdebatan-perdebatan yang tiada habisnya. Perdebatan selalu terjadi bila sudah menyangkut batasan-batasan yang diberikan norma-norma umum yang sudah mengakar, yang sepertinya akan dilanggar oleh tuntutan-tuntutan tentang peranan wanita.

Tapi norma-norma umumpun sudah pula bergeser akibat revolusi peranan wanita ini. Norma-norma politik yang sebelumnya men-tabu-kan wanita untuk berkecimpung didalamnya, benar-benar sudah terhapus di hampir seluruh negara dunia. Setidaknya, undang-undang hukum sudah menjamin keterlibatan wanita dalam hal-hal yang dasar seperti mengikuti pemilu, menghadiri pertemuan-pertemuan politik atau mendiskusikan soal-soal politik, sampai mengkampanyekan diri untuk mengisi jabatan-jabatan politis.

Penulisan ini mengambil pengalaman-pengalaman wanita Jepang dalam memperjuangkan hak dan peran politiknya.

Ada beberapa alasan mengapa Jepang dijadikan contoh ideal yang dapat mewakili proses perjuangan wanita menuntut peran politiknya diseluruh dunia untuk dipelajari.

Jepang adalah negara yang mengalami revolusi industri tercepat dunia dan berhasil menjadi negara terdepan dalam bidang industri. Kemajuan bidang industri tentu berdampak pada bidang sosial. Relatif singkatnya waktu yang dibutuhkan Jepang dalam membangun industrinya pastilah membawa dampak pergeseran-pergeseran nilai-nilai sosial yang menarik dicermati karena sebelumnya Jepang merupakan negara yang menganut sistem feodal dalam mengatur kehidupan sosialnya. Dampak-dampak perubahan ini menarik untuk dianalisa dalam hal seradikal atau sejauh mana nilai-nilai kehidupan yang dianut mengalami pergeseran, terlebih tentang nilai-nilai yang dilekatkan pada karakteristik wanita Jepang.

Di Jepang, perubahan pada aspek sosio ekonomis dari pertumbuhan pembangunan dan industrialisasi sangat mempengaruhi posisi wanita dalam kehidupan bermasyarakat, termasuk tingkat partisipasi mereka dalam masalah-masalah publik.

Kemiskinan, problem buta huruf, dan minimnya kesempatan memperoleh pendidikan—yang merupakan suatu yang identik dengan pertumbuhan ekonomi yang lemah—diseluruh dunia merupakan isu-isu atau faktor yang menyebabkan alasan

bagi wanita maupun pria terjun aktif di bidang politik. Pada negara-negara maju dibarat dimana wanita telah mendapatkan perlindungan undang-undang untuk berpartisipasi dalam bidang politik, isu-isu sosial seperti diatas sangat menyita perhatian bagi politisi pria maupun politisi wanita, sehingga sewaktu-waktu dapat mengurangi perdebatan isu gender diantara mereka—dimana isu gender peranan wanita sudah sangat melekat pada karakteristik politikus wanita. Selain itu harus juga dipertimbangkan bahwa partisipasi politik akan menjadi bagian hidup seorang warga negara bila kebutuhan-kebutuhan dasar diri dan sosial sudah terpenuhi. Dilain pihak, meningkatnya tingkat kemakmuran dan tingkat pendidikan, berkurangnya tingkat buta huruf, dan terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan lain dapat memicu warga negara, wanita maupun pria, meningkatkan serta memberi peluang partisipasi dalam hal politik, seaktif dan sedalam yang diinginkan.

Sekarang di Jepang, dengan tingkat pendapatan perkapita yang sangat tinggi, kebutuhan-kebutuhan dasar masyarakat sudah terpenuhi. Tingkat kemakmuran sudah mencapai level tinggi sehingga sembilan puluh persen dari

jumlah penduduk Jepang sekarang sudah dianggap sebagai kelas menengah. Tingkat buta huruf penduduk Jepang merupakan salah satu yang terendah diantara negara-negara dunia. Wilayah-wilayah di Jepang lebih dari tujuh puluh persen merupakan daerah perkotaan dengan fasilitas komunikasi dan fasilitas transportasi yang sangat lancar. Berita dan informasi-informasi politik mudah didapat.

Hal ini menunjukkan bahwa hampir tidak ada lagi hal-hal yang membatasi warga negara Jepang untuk terlibat secara aktif dalam bidang politik.

Hal ini juga berarti menempatkan Jepang menarik untuk dikaji dalam hal peranan wanitanya sebagai warga negara yang berpeluang untuk aktif terlibat di bidang politik, tapi ternyata masih punya batasan-batasan lain yang bersifat normatif khas bangsa-bangsa dibelahan timur dunia.

Secara kebetulan, kekalahan Jepang pada perang dunia ke-2 membuka jalan bagi wanita Jepang mendapatkan hak politiknya secara luas. Perubahan kondisi ini terbilang sangat ekstrim di banding kondisi sebelum perang dan masa-masa sebelumnya. Pada masa-masa sebelum perang memang ada gerakan-gerakan yang dibentuk dengan tujuan

memperjuangkan hak-hak wanita dalam bidang sosial dan politik, namun hasilnya tidak dapat merubah kondisi-kondisi ketidakberdayaan wanita Jepang. Walaupun demikian, pengaruh gerakan-gerakan perjuangan hak-hak wanita di Jepang tetap memberikan warisan berupa semangat yang begitu tinggi untuk mengubah keadaan.

Setidaknya, atas perjuangan gerakan-gerakan pembela hak-hak wanita, isu emansipasi wanita pernah menjadi perhatian salah satu partai politik berpengaruh sebelum masa perang dunia ke-2 - Partai *Seiyukai* , ketika partai itu membawanya pada sidang parlemen Majelis Rendah Jepang; walaupun akhirnya isu itu tetap tidak dipandang oleh negara.¹

Lebih jauh lagi, akibat keputusan negara Jepang untuk secara militer melakukan penguasaan terhadap negara-negara di Asia di waktu 1930-an, berdampak mematikan bagi isu persamaan hak wanita di Jepang. Kekuatan militer yang begitu berkuasa sampai mengontrol urusan-urusan sipil benar-benar mengubur gerakan emansipasi wanita.

¹ Political Woman in Japan, Susan J. Pharr

Di Jepang saat ini, kebanyakan orang berpendapat bahwa perubahan pandangan terhadap hak sipil, sosial dan politik kaum wanita Jepang dimulai dengan hadirnya kependudukan tentara sekutu.

Pada tahun 1945, dengan kalahnya Jepang pada perang dunia ke-2, tentara sekutu memasuki dan menguasai Jepang. Sebagai bagian dari usaha untuk mengembangkan demokrasi di Jepang, Otoritas Sekutu di Jepang melakukan reformasi dari bidang undang-undang pertanahan sampai pada diberikannya hak emansipasi wanita. Pada 10 April 1946, untuk pertama kalinya wanita-wanita di Jepang mengikuti pemilihan umum dan berhak mencalonkan diri bagi kedudukan politis.²

Kemajuan partisipasi wanita ini bisa dilihat dari banyaknya wanita yang secara langsung terlibat dalam politik. Wanita-wanita muda Jepang banyak yang memilih aktif di partai politik, dan bahkan terlibat lebih jauh dalam hal menentukan sendiri format dan perilaku politik yang pas bagi seluruh wanita Jepang.

Mereka benar-benar tetap berjuang untuk mendapatkan partisipasi seluas-luasnya dalam dunia politik.

² ibid

Perjuangan para wanita Jepang, khususnya aktifisnya, telah membawa perubahan positif ke arah kemajuan. Bersama-sama gerakan-gerakan aktifis wanita didunia, para aktifis wanita di Jepang mengalami kemajuan yang berarti dalam berjuang merealisasikan persamaan hak yang seimbang antara wanita dengan pria.

Dalam dekade 1990-an sangat jelas terlihat bahwa masyarakat dan pemerintah Jepang betul-betul sangat menghargai dan membutuhkan peran wanita dalam segala aspek kehidupan bernegara. Keseriusan pemerintah diwujudkan dengan didirikannya kantor pusat untuk gerakan persamaan hak gender (wanita). Kantor atau gerakan ini; dimana dipimpin langsung oleh perdana menteri dan juga beranggotakan para menteri dan kepala departemen pemerintah; telah merancang suatu gerakan yang bernama Gerakan Nasional Menyongsong Tahun 2000. Gerakan yang sangat aktif dipromosikan oleh pemerintah ini bertujuan menciptakan tatanan masyarakat dimana wanita dan pria diberikan hak berpartisipasi yang sama besarnya dalam semua aspek kehidupan bernegara. Implementasi dari gerakan nasional yang dirancang pada tahun 1977 ini selalu dipantau perkembangannya dan sejak

tahun 1992 pemerintah membuat laporan atau publikasi tahunan yang menggambarkan perkembangan gerakan nasional ini.³

Pada tahun 1995, yang bertepatan dengan peringatan limapuluh tahun berakhirnya perang dunia ke-2, publikasi laporan tahunan gerakan nasional diatas menggambarkan rangkuman dari kemajuan-kemajuan status wanita Jepang dalam kehidupan bernegara selama limapuluh tahun terakhir sejak berakhirnya perang. Laporan tersebut merangkum kemajuan di aspek-aspek seperti : usia hidup, kehidupan keluarga, pendidikan, kesempatan kerja, dan partisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Pada bagian lain dari laporan tahunan ini memberikan gambaran tentang kemajuan kebijakan mengenai persamaan hak gender pada periode april 1994 sampai dengan september 1995.⁴

Makin banyak wanita Jepang bangga terlahir sebagai wanita. Sebuah survey yang diadakan pada tahun 1950 melaporkan bahwa hanya 16,4 % responden wanita Jepang mengatakan seandainya mereka terlahir kembali mereka memilih akan menjadi wanita. Tapi pada survey yang

³ Laporan tahunan ke-5 dari implementasi Gerakan Nasional Menuju Tahun 2000, 26 Februari 1996, Office for Gender Equality, Prime Minister Office

⁴ ibid

diadakan tahun 1987, prosentasinya menjadi meningkat sampai 53,7 % dari responden wanita yang diwawancarai.

Harapan usia hidup wanita Jepang makin panjang. Pada tahun 1947, rata-rata tingkat harapan usia hidup wanita Jepang adalah 53,96 tahun, sedangkan untuk pria adalah 50,06 tahun. Pada tahun 1994 rata-rata tingkat harapan usia hidup meningkat menjadi 82,98 tahun untuk wanita dan 76,57 tahun untuk pria.

Kebebasan untuk menunda pernikahan pada usia sangat muda semakin besar. Hal ini menunjukkan bahwa pandangan lama tentang "usia tepat" untuk segera menikah sudah ditinggalkan.

Prosentasi wanita dalam hal melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi meningkat tajam. Jumlah remaja wanita yang mengikuti sekolah tingkat menengah atas lebih tinggi dibanding jumlah remaja pria sejak tahun 1969. Pada tahun 1955 hanya 2,4 % dari seluruh wanita yang lulus sekolah menengah atas yang melanjutkan ke universitas—jenjang S1 (sedang untuk lulusan pria 13,1 %). Tapi di tahun 1995 prosentasi jadi meningkat untuk wanita mencapai 22,9 % sedang untuk pria 40,7 %. Lulusan-lulusan wanita (tingkat sekolah menengah atas) lebih

cenderung melanjutkan ke jenjang kuliah dua tahun dimana di tahun 1975 rasionya lebih dari 20 %.

Peningkatan juga terjadi pada jumlah pekerja wanita. Angkatan kerja wanita cukup besar, rata-rata berumur menengah dan wanita yang sudah menikah banyak pula yang menjadi pekerja. Dari seluruh profesional yang memegang jabatan tingkat manajerial, pada tahun 1950 sekitar 1,3 % adalah wanita, tapi rasio ini terus meningkat di tahun 1975 yaitu 5,3 % dan tahun 1990 sekitar 9,2 %.

Pada periode 1945 - 1964 jumlah wanita yang mengikuti pemilihan umum lebih rendah daripada pria. Namun pada masa sesudahnya jumlah pemilih wanita telah melampaui jumlah pemilih pria.

Seiring kebijakan agar wanita ikut berpartisipasi dalam legislatif, pada pemilu 1946 untuk pertama kalinya terpilih anggota dewan legislatif dari wanita sejumlah 39 orang. Tetapi jumlah ini menurun tajam di tahun 1947. dan beberapa tahun berikutnya prosentasi anggota legislatif wanita berkisar antara 3,0 % sampai dengan 3,9 %. Namun akhirnya setelah Jepang memasuki era "Heisei", era perdamaian, sebuah era yang ditandai dengan naik tahtanya Kaisar Akihito di tahun 1989, rasio anggota legislatif

wanita jadi meningkat mencapai 6,3 % di tahun 1995. Kaum wanita juga meningkat partisipasinya pada bidang-bidang seperti pemerintahan dan hukum, menjadi anggota dewan penasehat nasional, dan bekerja di bidang-bidang pelayanan umum.

Perjuangan wanita Jepang dalam mendapatkan hak dan peran politiknya telah melahirkan wanita-wanita tangguh, aktifis politik yang tangguh, yang bukan saja menjadi "monumen" kebanggaan kaum wanita di Jepang, tapi di sisi lain juga menjadi agen-agen perubahan bagi seluruh rakyat Jepang dalam membangun negaranya. Mereka mampu menunjukkan cara lain, jalan lain, alternatif lain yang bahkan sering lebih baik dari para politisi pria dalam hal membangun bangsanya.

Sosok aktifis wanita yang sangat pantas dijadikan simbol kebanggaan kaum wanita Jepang wujud dalam diri seorang Takako Doi. Seorang politisi wanita yang karir politiknya sangat membanggakan kaumnya. Seorang politisi wanita yang telah berpikir dan merisaukan kondisi kaum wanita Jepang.

Simbol itu juga wujud dalam diri seorang Tamako Nakanishi. Seorang aktifis wanita yang mengorbankan

bagian besar waktu hidupnya dalam memperjuangkan partisipasi wanita di dalam format politik dan sosial di Jepang. Beliau telah berjuang keras dalam mengupayakan Undang-undang yang menjamin pemberian kesempatan mendapatkan kerja yang sama antara wanita dan pria di Jepang.

I.2. PERMASALAHAN

Permasalahan yang dibahas adalah tentang usaha-usaha wanita Jepang untuk mendapatkan hak dan peran politiknya sebagai aktualisasi dari tingkat pendidikan dan kemakmuran ekonomi yang tinggi berhadapan dengan kendala nilai-nilai yang dianut bangsa-bangsa timur.

I.3. TUJUAN PENULISAN

Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk memahami lebih dalam tentang seberapa jauh perubahan dan perkembangan cara pandang wanita Jepang saat ini terhadap peran politik mereka sebagai hasil perjuangan mewujudkan idealisme tentang wajibnya peranan politik wanita Jepang.

I.4. RUANG LINGKUP

Penulis membatasi permasalahan pada dampak dan hasil-hasil dari kampanye sosialisasi tentang emansipasi wanita dalam bidang sosial dan politik dalam kurun waktu 1988 sampai dengan 2003.

I.5. METODE PENELITIAN

Dalam penulisan skripsi ini digunakan metode kajian perpustakaan; dengan menggunakan sumber-sumber yang menjadi koleksi perpustakaan Universitas Darma Persada, serta kajian melalui situs-situs internet.

I.6. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I PENDAHULUAN

Pada BAB I ini diuraikan latar belakang dipilihnya topik usaha perjuangan wanita Jepang dalam mendapatkan peran dan hak politiknya, juga disampaikan ruang lingkup, tujuan penulisan, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II SISTEM PERUNDANG-UNDANGAN JEPANG

BAB III GERAKAN PERSAMAAN HAK WANITA DI JEPANG

BAB IV ANALISIS

BAB V KESIMPULAN

